

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2022**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN  
KABUPPEMERINTAH  
ATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, renja perangkat daerah disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rencana Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 ini merupakan dokumen rencana pembangunan satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, yang disusun secara sinergis dan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran/indikator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat



sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musrenbang tahunan (musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD dan musrenbang kabupaten) dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 dapat menjadi acuan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 serta menilai tingkat pencapaian kinerja.

Muara Sabak, Januari 2022

KEPALA DINAS



Drs. ADIH P. ARITONANG  
NIP. 196808311988101001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penyusunan Renja .....	4
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b> .....	<b>5</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 .....	5
2.2. Analisis Kinerja Penerimaan SKPD .....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD .....	17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	19
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN</b> .....	<b>21</b>
3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional, provinsi, daerah .....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja .....	25
3.3. Program dan kegiatan tahun 2022 .....	30
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN             KAWASAN PERMUKIMAN</b> .....	<b>39</b>
<b>BAB V    PENUTUP</b> .....	<b>39</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel	2.1. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 .....	14
Tabel	2.2. Realisasi capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 .....	16
Tabel	2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 .....	18
Tabel	3.1. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	26
Tabel	3.2. Rumusan Rencana Program dan kegiatan tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	32



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja OPD sebagai penjabaran Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang



tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

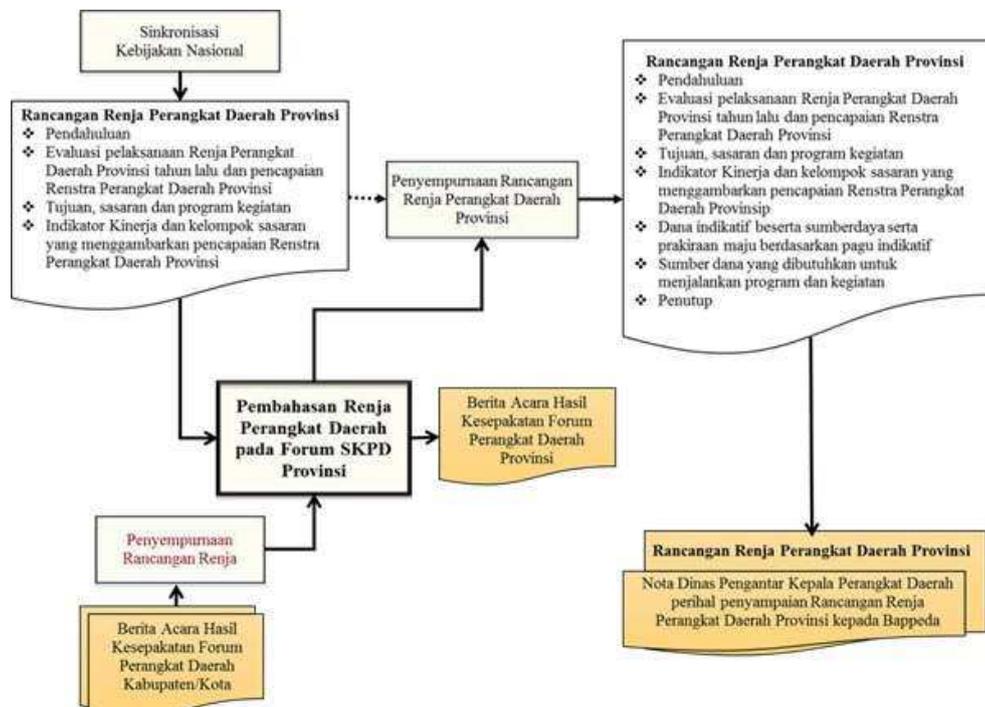
Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Penyusunan Renja Dinas Perumahan Kawasan



Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 mempedomani pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2021-2026 dan hasil forum perangkat daerah. Alur proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

**Gambar 1.2** Tahapan dan Tatacara Penyusunan RENJA





## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

#### **13.1. Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022.
- b. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022.
- d. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022.



#### **1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renja.

##### **BAB II Evaluasi Renja Tahun lalu**

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2), kinerja pelayanan perangkat daerah, dan isu-isu penting pelaksanaan tugas dan fungsi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

##### **BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Memuat tujuan dan sasaran berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

##### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2022, serta rencana pendanaan yang diperlukan.

##### **BAB V Penutup**

Berisi kalimat-kalimat penutup.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra 2016-2021**

##### **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun lalu (tahun 2020) dilakukan terhadap semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.

Realisasi anggaran yang dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 untuk belanja tidak langsung sebesar 98,60% atau Rp 3.091.044.253,- dan untuk belanja langsung sebesar 97,11% atau Rp 38.922.927.810,- sedangkan untuk realisasi fisik Belanja Tidak langsung adalah sebesar 100 % dan Belanja langsung sebesar 99,30 %.

Adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 berdampak pada proses pengalihan dan rasionalisasi penganggaran. Manifestasi dari dampak *Covid-19* ini juga terlihat dari kondisi ekonomi yang menjadi tidak pasti serta pembatasan berbagai kegiatan yang diputuskan oleh pemerintah dalam menekan kenaikan angka infeksi harian. Sehingga mengakibatkan capaian kinerja dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditahun 2020 tidak mencapai 100% atau mengalami penurunan sebesar 0,70%.



Capaian realisasi fisik program/kegiatan di tahun 2020 terbagi menjadi 2 kategori capaian yaitu mencapai target dan tidak mencapai target. Adapun Program/kegiatan yang mencapai target realisasi Fisik Program/kegiatan antara lain :

- **Program/kegiatan yang mencapai target Realisasi fisik Program/kegiatan yang direncanakan**
  1. Program Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan
  2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan :
    - a. pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
    - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - d. Penataan File Kepegawaian
  3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur pada kegiatan :
    - a. Pembangunan Gedung Kantor
    - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
    - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
    - d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan pada kegiatan :
    - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada kegiatan :
    - a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
    - b. Evaluasi Rencana Kerja
  6. Program Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih pada kegiatan :



- a. Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
  - b. Operasional UPTD sistim penyediaan Air Minum
- **Program/kegiatan yang tidak mencapai target Realisasi fisik Program /kegiatan yang direncanakan**
    - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terealisasi sebesar 94,04% atau menurun 5,96% dari target realisasi fisik yang sudah direncanakan dikarenakan pada kegiatan :

      1. Penyediaan Alat Tulis Kantor outputnya yang berupa belanja bahan pakai habis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Refocusing anggaran/Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.
      2. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan outputnya berupa barang cetakan dan penggandaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Refocusing anggaran/Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.
      3. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan outputnya berupa belanja surat kabar harian tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Refocusing anggaran/Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.
      4. Penyediaan Makanan Dan Minuman outputnya berupa makan minum rapat, makan minum tamu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Refocusing anggaran/Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.
      5. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah outputnya berupa perjalanan dinas luar daerah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
      6. Rapat Monitoring Dan Evaluasi Dalam Daerah outputnya berupa perjalanan dinas dalam daerah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar.



b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Terealisasi 99,80% atau turun 0,20% dari target realisasi fisik yang sudah direncanakan dikarenakan pada kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional outputnya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan adanya refocusing/Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

terealisasi 90,80% atau turun 9,20% dari target realisasi fisik yang telah direncanakan dikarenakan pada kegiatan :

1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal outputnya kursus-kursus singkat/pelatihan tidak dapat dilakukan sepenuhnya dikarenakan adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

d. Program Penyediaan Sarana Presarana Air Bersih.

terealisasi 98,30% atau turun 1,70% dari target realisasi fisik yang telah direncanakan dikarenakan pada kegiatan :

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat berpenghasilan rendah outputnya berupa hibah barang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya refocusing/Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.

e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

terealisasi 97,72% atau turun 2,28% dari target realisasi fisik yang telah direncanakan dikarenakan pada kegiatan :

1. Kegiatan Penataan, Pemeliharaan Dan Pengawasan Taman Kota outputnya berupa bangunan gedung kantor tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya refocusing/Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.



2. kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pertamanan salah satu outputnya berupa perjalanan tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya refocusing/Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.

f. Program Penerangan Lampu Kota

terrealisasi 98,04% atau turun 1,96% dari target realisasi fisik yang telah direncanakan dikarenakan pada kegiatan :

1. Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota salah satu outputnya berupa perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya refocusing/Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Lampu Kota salah satu outputnya berupa perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya refocusing/Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.

g. Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi

terrealisasi 91,51% atau turun 8,49% dari target realisasi fisik yang telah direncanakan dikarenakan pada kegiatan :

1. Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah salah satu outputnya berupa perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya refocusing/Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.

Capaian realisasi program/kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020 yang sudah diuraikan tersebut diatas tadi tersaji pada Tabel 2.1 berikut ini;



**Tabel 2.1**

**Realisasi Program/Kegiatan TA 2020**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Realisasi	
			Keuangan %	Fisik %
1.05.1.05.01	BELANJA	43.214.918.194,53	97,22	99,40
1.05.1.05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.135.034.407,90	98,60	100,00
1.05.1.05.01.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.135.034.407,90	98,60	100,00
1.01.03.1.01.04.01.030	BELANJA LANGSUNG	40.079.883.786,63	97,11	99,30
1.01.03.1.01.04.01.030.001	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	14.083.449.969,63	99,23	100,00
1.01.03.1.01.04.01.030.001.5.2	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	13.934.842.219,63	99,29	100,00
1.01.03.1.01.04.01.030.002	Pembangunan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	148.607.750,00	93,47	95,65
1.01.1.01.04.01.001	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.977.413.000,00	91,86	94,04
1.01.1.01.04.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000,00	100,00	100,00
1.01.1.01.04.01.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	48.000.000,00	73,04	100,00
1.01.1.01.04.01.001.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	497.300.000,00	80,77	100,00
1.01.1.01.04.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.207.500,00	99,89	100,00
1.01.1.01.04.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.267.700,00	96,72	98,90
1.01.1.01.04.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.150.000,00	97,53	99,71
1.01.1.01.04.01.001.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	99,68	100,00
1.01.1.01.04.01.001.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	96,00	98,20
1.01.1.01.04.01.001.001.017	Penyediaan makanan dan minuman	392.200.000,00	96,00	98,20
1.01.1.01.04.01.001.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24.935.800,00	-	
1.01.1.01.04.01.001.019	Penataan file kepegawaian	1.797.952.000,00	97,86	100,00
1.01.1.01.04.01.001.033	Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	90.000.000,00	42,94	45,12
1.01.1.01.04.01.002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8.043.835.122,00	98,25	98,10
1.01.1.01.04.01.002.003	Pembangunan gedung kantor	6.254.959.344,00	99,79	100,00
1.01.1.01.04.01.002.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	475.900.000,00	99,62	100,00
1.01.1.01.04.01.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	1.064.235.778,00	88,35	90,52
1.01.1.01.04.01.002.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.450.000,00	99,38	100,00
1.01.1.01.04.01.002.028	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	226.290.000,00	99,37	100,00
1.01.1.01.04.01.005	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	7.900.000,00	88,61	90,80



1.01.1.01.04.01.005.001	Pendidikan dan pelatihan formal	7.900.000,00	88,61	90,80
1.01.1.01.04.01.006	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	42.800.000,00	100,00	100,00
1.01.1.01.04.01.006.001	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd	42.800.000,00	100,00	100,00
<b>1.01.1.01.04.01.007</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>99,00</b>	<b>100,00</b>
1.01.1.01.04.01.007.003	Penyusunan rencana kerja (renja)	2.500.000,00	98,00	100,00
1.01.1.01.04.01.007.004	Evaluasi rencana kerja	2.500.000,00	100,00	100,00
<b>1.01.03.1.01.04.01.111</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRESARANA AIR BERSIH</b>	<b>9.356.687.850,00</b>	<b>96,12</b>	<b>98,30</b>
1.01.03.1.01.04.01.111.001	Pembangunan sumur-sumur air tanah	1.131.698.000,00	99,22	100,00
1.01.03.1.01.04.01.111.002	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	2.312.586.250,00	88,05	90,28
1.01.03.1.01.04.01.111.003	Operasional uptd sistim penyediaan air minum	5.912.403.600,00	98,68	100,00
<b>1.01.04.1.01.04.01.152</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU</b>	<b>1.210.703.200,00</b>	<b>95,54</b>	<b>97,72</b>
1.01.04.1.01.04.01.152.001	Kegiatan penataan, pemeliharaan dan pengawasan taman kota	920.303.200,00	97,64	99,82
1.01.04.1.01.04.01.152.002	Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pertamanan	290.400.000,00	88,88	91,06
<b>1.01.04.1.01.04.01.153</b>	<b>PROGRAM PENERANGAN LAMPU KOTA</b>	<b>2.841.967.645,00</b>	<b>95,96</b>	<b>98,04</b>
1.01.04.1.01.04.01.153.001	Kegiatan pemasangan lampu jalan,taman dan hutan kota	1.541.500.000,00	95,70	97,98
1.01.04.1.01.04.01.153.002	Kegiatan pemeliharaan rutin berkala lampu kota	1.300.467.645,00	96,26	98,44
<b>1.01.04.1.01.04.01.154</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI</b>	<b>1.510.127.000,00</b>	<b>91,24</b>	<b>91,51</b>
1.01.04.1.01.04.01.154.001	Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah	1.510.127.000,00	91,24	91,51



Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung jabung Timur sampai dengan Tahun 2021 tersaji pada pada tabel 2.2 berikut ini :



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun) - 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran</b>			<b>100%</b>			<b>100%</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2.722 buah	1.157 buah	2.722 buah	650 buah	23,88	2.722 buah	2.507 buah	92
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100,00	12 kali	12 kali	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan kantor	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100,00	4 kali	4 kali	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan, jumlah penggandaan	143.000 lembar	60.000 lembar	143.000 lembar	61.017 lembar	42,67	143.000 lembar	304.756 lembar	213



	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	110 buah	110 buah	110 buah	110 buah	100,00	110 buah	110 buah	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	100
	Penyediaan Bahan Makan dan Minum	Pembayaran makan minum rapat/tamu	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	100
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	100
	Penataan File Kepegawaian	Pembayaran jasakerja PHIT	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali	100,00	11 kali	11 kali	100
	Rapat evaluasi dan monitoring dalam daerah	Pembayaran monitoring, evaluasi dalam daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	100
	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>		
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah ruang / gedung kantor yang terpelihara	2 unit	2 unit	2 unit	7 unit	350,00	2 unit	10 unit	500
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan yang roda 2, roda 3, roda 4	2 unit	2 unit	2 unit	-	0,00	2 unit	10 unit	500
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung / kantor yang terpelihara	27 unit	11 unit	27 unit	26 unit	100,00	27 unit	135 unit	500



	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	100,00	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung / kantor yang terpelihara	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	100,00	27 unit	27 unit	100
	Rehab Sedang./Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	50,00	2 unit	10 unit	500
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>persentase peningkatan disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN	180 stell	189 stell	189 stell	-	0,00	180 stell	720 stell	208
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>presentase peningkatan sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>		
	Pendidikan Pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100,00	10 orang	10 orang	100
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>B</b>		<b>B</b>			<b>BB</b>		
	Penyusunan Laporan Laporan Cpaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan, perjanjian kinerja, LAKIP,LKPJ dan LPPD yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100,00	5 dokumen	25 dokumen	500



	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>persentase tersedianya dokumen Renstra dan Dokumen Renja</b>	100%		100%			100%		
	Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	10 dokumen	500
	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	10 dokumen	500
	Evaluasi Rencana Kerja	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	10 dokumen	500
	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>	<b>Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)</b>	40,59%		40,59%			44,22%		
	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Panjang Jalan Lingkungan	5.489	4.787	5.227	3.139	100,00	5.489	15.695	286
	Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah Rumah Layak Huni	500	440	500	273	100,00	500	1250	250
	<b>Program Penyediaan Sarana dan prasarana Sanitasi</b>	<b>Persentase Sanitasi Layak</b>	67,00%		67,00%			67,23%		
	Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah	Jumlah Sambungan Rumah	2.589	1.525	3.975	2528	63,60	2.589	12640	488
	<b>Program Penyediaan sarana prasarana air bersih</b>	<b>Proporsi RT dg akses berkelanjutan terhadap air minum layak</b>	77,90%		77,90%	80,65%		80,65%		
	Pembangunan sumur sumur air tanah	Jumlah Sumur Yang Dibangun	15	3	12	15	100,00	15	50	334



	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah Sambaungan Rumah	1030	940	1025	591	100,00	1030	2500	243
	Operasional Uptd Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Sambaungan Rumah	6.770	4.828	5.690	5.053	100,00	6.770	5690	84
	<b>Program Pengelolaan RTH</b>	<b>persentase taman yang terbangun</b>	<b>88%</b>		<b>88%</b>		100,00	<b>100%</b>		
	Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota	Jumlah Taman	9	1	8	1	100,00	9	8	89
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Taman	77	40	60	31	100,00	77	155	201
	<b>Program Penerangan Lampu Kota</b>	<b>persentase Jumlah LPJU yang terpasang</b>	<b>83%</b>		<b>83%</b>		100,00	<b>100%</b>		
	Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota	Jumlah Lpju yang Terpasang	6170	219	5121	204	100,00	6170	336	0,54
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	Jumlah Lpju Yang Terpelihara	8972	1937	2195	1237	100,00	8972	904	10,08



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Berdasarkan Renstra 2016-2021, Dinas Perumahan Kawasan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2020 memiliki 6 (enam) indikator kinerja, sedangkan pada Renstra tahun 2021-2026 hanya memiliki 4 (empat) indikator kinerja. Untuk indikator kinerja ditahun 2020 tercantum pada tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Proporsi RT dg akses berkelanjutan terhadap air bersih	1. menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (SDGs tujuan global XI) 2. SPM Perumahan (PermenPU PR Nomor 29/PRT/M/2018)	IKK, IKU	28,09	90,00	62,80	92,00	56,00	88,89	80,00	95,00	Tidak Mencapai target
2	Persentase Rumah tangga yang telah memiliki sanitasi layak			67,00	74,80	73,29	118,00	15,20	112,90	73,29	112,12	Tidak Mencapai target
3	Persentase pengurangan kawasan kumuh			5,11	119,88	115,80	112,88	4,12	97,71	112,00	100,00	Tidak Mencapai target
4	Persentase jalan lingkungan kondisi baik			40,59	66,75	67,92	69,08	65,58	111,91	70,00	70,20	Melampaui target

*data akhir juli 2021*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Proporsi RT dg akses berkelanjutan terhadap air Bersih

Proporsi RT dg akses berkelanjutan terhadap air bersih ini diukur dengan membandingkan jumlah seluruh rumah tangga dengan rumah yang mendapatkan layana air bersih. Target kinerja indikator pada tahun 2020 adalah 28,09. Dari hasil pendataan yang didapat jumlah rumah yang tersambung dengan air bersih adalah sebanyak 3240 (Data BPS Tanjung Jabung Timur 31 Desember 2020) dihitung



Proporsi RT dengan akses Berkelanjutan terhadap air bersih sebesar (3240 / 54785x100) atau tercapai 21,05 %.

2. Persentase Rumah tangga yang telah memiliki sanitasi layak

Pada indikator kinerja ini, capaian kinerja tahun 2020 telah mencapai 15,10% atau kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 67%, namun sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat, maka idealnya akan ada upaya peningkatan pelaksanaan pemenuhan sanitasi yang layak.

3. Persentase pengurangan kawasan kumuh

Pada indikator kinerja ini, capaian kinerja tahun 2020 telah mencapai 4,12% atau tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 5,11%, namun sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat, maka idealnya tetap akan ada upaya peningkatan pelaksanaan pemenuhan pengurangan kawasan kumuh.

4. Persentase jalan lingkungan kondisi baik

Pada indikator kinerja ini, capaian kinerja tahun 2020 telah mencapai 65,58% atau melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 40,59%, namun sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat, maka idealnya tetap akan ada pelaksanaan untuk tetap melakukan peningkatan jalan atau melakukan perawatan atas penataan-penataan yang sudah dilaksanakan.

## PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain :

- a) Anggaran Salah satu aspek dalam pencapaian target kinerja adalah ketersediaan anggaran. Perencanaan yang telah disusun dengan baik apabila tidak didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup, maka pelaksanaannya tidak akan



optimal. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memiliki anggaran yang proposional dalam mengatasi permasalahan terkait penataan lingkungan.

- b) Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidangnya Jumlah pegawai yang kompeten di bidangnya masih kurang mengakomodir untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga diperlukan rekrutmen pegawai berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
- c). Sarana dan prasarana yang belum optimal. Sarana dan prasarana yang masih belum optimal saat ini menjadi kendala bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian pelayanan kepada masyarakat

Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur diantaranya adalah:

- a) Tantangan Tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan adalah sebagai berikut:
  - 1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan resiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh .
  - 2. Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak (5,12%) dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau illegal Bab II



Evaluasi Renja Tahun Lalu Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 VIII.29

3. Belum optimalnya penataan permukiman kumuh, dimana masih ada 14,26% permukiman kumuh menurut baseline data permukiman kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum tertata
4. Belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang
5. Perlu sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
6. Kecenderungan peningkatan kebutuhan penyediaan rumah layak huni di perkotaan yang semakin tinggi seiring semakin dominannya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan
7. Adanya wabah Covid-19 yang berimplikasi pada keperluan banyak lahan untuk pemakaman jenazah Covid-19.

b) Peluang

Untuk menjawab tantangan yang dihadapi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu memanfaatkan peluang sebagai berikut:

1. Terdapat fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) dari pengembang perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau/Taman, areal pemakaman umum, dan sebagainya
2. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk lebih



mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan

3. Tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan
4. Semakin kritis dan proaktif-nya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
6. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan, permukiman.
7. Adanya prioritas nasional dalam mengurangi kawasan kumuh menjadi nol persen membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan bantuan peningkatan kapasitas SDM dan dana dalam penataan kawasan permukiman kumuh.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan public dan budaya kerja aoaratur
2. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan perumahan seperti jalan jalan lingkungan, parit/drainase dan penanganan kawasan kumuh yang tercantum dalam SK Bupati Tanjung Jabung Timur, dll.
3. Meningkatkan kualitas jalan dan lingkungan.



#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, adalah sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 yang tersaji pada tabel 2.4 merupakan telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD. Pada rancangan awal RKPD (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Materi tersebut dipergunakan dalam pertemuan forum SKPD, sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan PD berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan untuk mengisi Renja PD Tahun 2021. Selanjutnya, pada hasil analisis kebutuhan (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah penyampaian Pagu Indikatif RKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022. Dengan adanya pagu indikatif RKPD dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2022 dan Penyusunan RKPD Tahun 2022. Indikator-indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif yang tercantum



pada rancangan awal RKPD Tahun 2022 sudah sesuai dengan kebutuhan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini ;



Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM/ PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	Target					
					2018	2014	2015	2016	2017	2019
1	Berkurangnya wilayah kawasan kumuh	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	%	5.11	5.00	5.01	5.05	5.05	5.12
2	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)	%	31.63	30.00	31.20	31.20	27.43	36.70
3	1.Persentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih, 2. Persentase rumah tangga yang bersanitasi layak	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	%	66.90	65.20	65.70	65.70	66.90	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Proporsi RT dg akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	57.20	52.20	55.23	56,20	15.75	
3	Meningkatnya penyiapan penataan pertamanan dan RTH	Pogram pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase taman yang terbangun	%	67	55.37	66.89	78.41	58	77
		Penerangan lampu kota	Persentase LPJU yang Terpasang	% %	49 -	100 -	100 -	100	31	66
3	Tata Kelola Pemerintah yang baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana	Rasio Pelayanan	%	100	-	-	100	100	100



		dan prasarana Aparatur								
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya SDM Aparatur	%	100	-	100	100	100	100
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	100	-	100	100	100	100
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	Tercapainya tujuan organisasi	%	100	-	100	100	100	100
		Perencanaan SKPD	Terwujudnya tujuan OPD	%	100	-	100	100	100	100
		Pengembangan Data & Informasi	Tercapainya Data yang akurat	%	100	-	100	100	100	100



Review Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2020, meliputi aspek :

1. Perumahan dan Permukiman

- Percepatan serah terima prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang rumah sehat melalui penyuluhan-penyuluhan dikelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Penyuluhan rumah sehat serta inventarisasi rumah tidak layak huni.

2. Pengendalian pemanfaatan ruang kota

Untuk menciptakan kawasan yang tertata, tertib dan teratur maka diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan membentuk tim pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta pengendalian terhadap perizinan yang dikeluarkan.

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang melalui aplikasi Simreda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) dan yang akan menjadi prioritas utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;
2. Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, Program Daerah yang telah dituangkan dalam RPJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

##### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi, Daerah

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

3.1.1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

- Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.
- Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat  
Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang dimatkan dalam Undang- Undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.



- 2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan
- 3) Pembangunan Perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

### 3.1.2. Undang - Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- 2) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan



- dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
  - 4) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
  - 5) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan;
  - 6) industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
  - 7) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
  - 8) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
  - 9) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
  - 10) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
  - 11) melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
  - 12) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas



umum perumahan dan kawasan permukiman;

13) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

14) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;

15) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;

16) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan

17) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

### 3.1.3. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Perumahan sebagai berikut:

- Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.
- Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat : Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang



layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".

Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat :

- 1) Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan perumahan
- 2) Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi PSU pendukungnya.
- 3) Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara.
- 4) Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- 5) Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial:
  - a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial
  - b. Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas
  - c. Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**



### 3.2.1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan sinergitas pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- 2) Menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

Tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Keberpihakan para pengembang untuk membangun rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan secara swadaya permukiman yang layak huni.
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mencegah dan mengurangi luas kawasan kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait lampu jalan dan pertamanan.

### 3.2.2. Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Dinas Perumahan dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui penyusunan Rencana Kerja OPD adalah :

- 1) Mendorong terciptanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 2) Mendorong terciptanya kepastian dan perlindungan hukum dalam bermukim;



- 3) Menyusun Norma Standar Panduan Manual (NSPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman berbasis masyarakat;
- 4) Mengembangkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat;
- 5) Meningkatkan fasilitasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
- 6) Meningkatkan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 8) Mendorong pelaksanaan penataan ruang kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif;

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian			
				Tahun 2021		Tahun 2022	
				Target	Jumlah	Target	Jumlah
1	2	3	6	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas permukiman dan penyediaan				39.286.725.784		21.010.374.397
		Meningkatkan sarana umum masyarakat	Persentase Sarana Umum Masyarakat	90%	352.000.000	91,00 %	1.188.000.000



perumahan	sarana dan prasarana air bersih	dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih				
		<b>persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>352.000.000</b>	<b>91,00 %</b>	<b>1.188.000.000</b>
		Jumlah Sumur Yang Dibangun	9	352.000.000	7	1.188.000.000
		<b>Cakupan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan</b>	<b>26,71%</b>	<b>9.686.584.750</b>	<b>84,25 %</b>	<b>11.977.284.643</b>
		<b>Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>9.686.584.750</b>	<b>1,47 %</b>	<b>11.977.284.643</b>
		Jumlah Sambungan	82	720.495.532	-	466.604.443



		Rumah				
		Jumlah Sambungan Rumah	733	3.406.411.404	751	5.981.254.000
		Jumlah Sambungan Rumah	205	450.000.000	40	-
		Jumlah Sambungan Rumah	12	5.109.677.814	55	5.529.426.200
		<b>Persentase masyarakat yang terlayani</b>	<b>0</b>	-	<b>0,87</b>	<b>900.000.000</b>
		<b>Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	-	0,87	900.000.000
		jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	<b>0</b>	-	500	900.000.000
	<b>Meningkatka n Sanitasi Layak Bagi Masyarakat</b>	<b>Persentase Rumah Tangga Bersanitasi</b>	<b>73,08</b>	<b>8.384.736.180</b>	<b>115,3 9</b>	<b>1.267.549.440</b>
		<b>Persentase sambungan rumah bersanitasi aman</b>	100	8.384.736.180	2,49	1.267.549.440



			Sambungan Rumah Bersanitasi aman	1164	8.384.736.180	14,30	1.267.549.440
			<b>Persentase Drainase dalam kondisi baik</b>	<b>60%</b>	<b>595.935.605</b>	<b>60%</b>	<b>410.000.000</b>
			<b>Drainase yang terbangun</b>	<b>100%</b>	<b>595.935.605</b>	<b>60%</b>	<b>410.000.000</b>
			panjang Drainase yang terbangun	175 m	595.935.605	150 m	410.000.000
	<b>Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan</b>	<b>Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik</b>	<b>Persentase</b>	<b>66,75</b>	<b>20.267.469.249</b>	<b>67,92</b>	<b>11.520.000.000</b>
<b>panjang Jalan Lingkungan</b>			<b>102,21</b>	<b>67,92</b>		<b>11.520.000.000</b>	
<b>Panjang Jalan yang dibangun</b>			5564 m	4270 m		11.520.000.000	
					<b>22.267.101.828</b>		<b>16.216.788.565</b>
<b>2</b>	<b>Meningkatkan mutu pelayanan pemerintah daerah</b>	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja</b>	<b>Indeks Pelayanan Instansi</b>	<b>78</b>	<b>12.867.245.563</b>	<b>81</b>	<b>9.883.112.495</b>
			<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan</b>	<b>8</b>		<b>107.314.800</b>	<b>127.149.800</b>
			Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	3		9.199.800	3



		Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)	4	27.350.000	4	26.750.000
		Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah (tahun)	1	70.765.000	1	90.000.000
		<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>6.020.259.984</b>	<b>100</b>	<b>6.437.906.374</b>
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (tahun)	1	3.557.207.884	1	4.077.666.374
		Pembayaran jasa administrasi keuangan (Tahun)	1	2.463.052.100	1	2.360.240.000
		<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>140.300.000</b>	<b>100</b>	<b>90.300.000</b>
		Jumlah pakaian dinas ASN beserta atribut kelengkapannya (stel)	185	90.300.000	185	90.300.000
		Jumlah ASN yang	<b>10</b>		<b>10</b>	



			mengikuti diklat/pelatihan formal (orang)		50.000.000		-
			<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah</b>	<b>100</b>	<b>606.215.514</b>	<b>100</b>	<b>628.622.641</b>
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan (buah)	110	6.586.600	110	6.501.800
			Jumlah peralatan gedung / kantor yang terpelihara (unit)	20	90.041.191	20	106.645.333
			Jumlah jenis barang cetakan, jumlah penggandaan (jenis)	4	31.102.723	4	29.490.508
			Pembayaran tagihan surat kabar (tahun)	1	5.400.000	1	5.400.000
			Pembayaran makan minum rapat/tamu (tahun)	1	392.201.000	1	392.201.000
			Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah (tahun)	1	80.884.000	1	88.384.000
			<b>Persentase Pengadaan</b>	<b>38</b>	<b>3.300.107.265</b>	<b>40</b>	<b>4.206.454.717</b>



			<b>Barang Milik Daerah (unit/buah)</b>				
			Jumlah mebel (buah)	16	37.782.265	16	83.213.618
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya (buah)	20	62.325.000	20	96.525.000
			Jumlah ruang / gedung kantor yang terbangun (unit)	2	3.200.000.000	4	4.026.716.099
			<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>50.850.000</b>	<b>100</b>	<b>52.320.000</b>
			Jumlah Materai (lembar)	2.721	2.850.000	3.000	4.320.000
			Pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun)	1	48.000.000	1	48.000.000
			<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.642.198.000</b>	<b>100</b>	<b>903.156.000</b>



			Jumlah kendaraan yang dipelihara (unit)	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	815.740.000	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	887.686.000
			Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (unit)	12	15.470.000	13	15.470.000
			Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	3	1.810.988.000	3	-
3	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Berkurangnya permukiman kumuh	Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	3,32	304.185.420	6,46	975.000.000
			Perentase Berkurangnya permukiman kumuh	4,72%	304.185.420	5,45%	975.000.000
			Jumlah Rumah Layak Huni	51 unit	304.185.420	50 unit	975.000.000
			Jumlah Permukiman yang	5,00	-	5,00%	-



			ditangani				
			<b>Tingkat kepuasan hunian di rusunawa</b>	<b>80,00</b>	-	<b>80,00</b>	<b>331.515.070</b>
			<b>Tingkat kepuasan pelayanan rusun</b>	<b>80,00</b>	-	<b>80,00</b>	<b>331.515.070</b>
			Pelayanan Hunian Rumah Susun	80,00	-	80,00	331.515.070
			<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum</b>	<b>39,57</b>	<b>9.095.670.845</b>	<b>51,64</b>	<b>5.027.161.000</b>
				<b>72,73</b>		<b>77,92</b>	
			<b>Persentase PSU yang dibangun</b>	<b>65</b>	<b>9.095.670.845</b>	<b>150</b>	<b>5.025.688.000</b>
			Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum	65	9.095.670.845	150	5.025.688.000

### **3.3. Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021**

Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### **A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**



- a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
  - b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
    - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
    - Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
    - Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
  - c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
  - d. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
    - Pembangunan Jalan
- B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    - e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- h. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 
- i. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Pengadaan Mebel
- j. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat



- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  
- k. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  
- 6. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
  - 1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
    - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
  
- 7. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
  - m. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
    - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Untuk keterangan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten



Tanjung Jabung Timur dapat dijelaskan dalam tabel Renja hasil e-Planning 2020  
terlampir sebagai berikut:



Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tabun 2021			Catatan Penting	Rencana Tabun 2022		Sumber Dana		
			lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu indikatif		target capaian kinerja	Kebutuhan dana / Pagu indikatif	APBD II	APBD I	APBN
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				18.474.995.098			22.287.849.599			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				62.325.000			75.000.000			
a	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				62.325.000			75.000.000			
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianyanalat dan mesin lainnya selama 12 bulan	kab.tanjab timur	Terpenuhinyan alat dan mesin lainnya selama 12 bulan	62.325.000		Terpenuhinyan alat dan mesin lainnya selama 12 bulan	75.000.000	v		



		2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>				5.922.774.374			6.009.677.814				
			<b>b</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>			5.922.774.374			6.009.677.814				
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	kab.tanjab timur	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	363.096.560		Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	450.000.000	v	v	v

				Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	kab.tanjab timur	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan	450.000.000		Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap kegiatan air minum bagi masyarakat berpenghasilan	450.000.000	v	v	v
--	--	--	--	---	--	---------------------	--	-------------	--	--	-------------	---	---	---



							rendah			rendah					
				-	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Operasional UPTD SPAM	kab.tanjab timur	Meningkatnya Penyediaan Operasional UPTD SPAM	5.109.677.814		Meningkatnya Penyediaan Operasional UPTD SPAM	5.109.677.814	v	v	v
		3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>						<b>703.171.785</b>			<b>703.171.785</b>			
			c	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>703.171.785</b>			<b>703.171.785</b>			
				-	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan percepatan Sanitasi Pemukiman	kab.tanjab timur	Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap untuk penunjang kegiatan percepatan	703.171.785		Dimilikinya sarana dan prasarana yang lengkap untuk penunjang kegiatan percepatan	703.171.785	v	v	v



						Sanitasi Pemukiman			Sanitasi Pemukiman			
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				11.786.723.939			15.500.000.000		



			d	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					11.786.723.939			15.500.000.000				
			-	Pembangunan Jalan	Tersedianya jalan dan jembatan perdesaan	kab.tanjab timur	Meningkatnya Penyediaan jalan dan jembatan perdesaan		11.786.723.939		Meningkatnya Penyediaan jalan dan jembatan perdesaan	15.500.000.000	v			
	B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							15.104.953.931			15.699.351.243				
		5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.554.147.666			10.148.544.978				
			e	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					99.064.800			134.199.800				
			-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Dinas	kab.tanjab timur	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, dan Laporan Tahunan		9.199.800		Tersusunnya Renja, RKA, DPA, dan Laporan Tahunan	9.199.800	v			



*Pemerintah Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur*

				-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Dinas	kab.tanjab timur	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	89.865.000	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan	125.000.000	v		
				<b>f</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>6.077.402.087</b>		<b>6.253.569.987</b>			
				-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan tenaga Honor selama 12 bulan	kab.tanjab timur	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan tenaga honoror selama 12 bulan	3.403.569.987	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan tenaga honoror selama 12 bulan	3.403.569.987	V		



					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium penunjang kegiatan selama 12 bulan	kab.tanjab timur	Telaksananya pembayaran honorarium penunjang kegiatan selama 12 bulan	2.673.832.100		Telaksananya pembayaran honorarium penunjang kegiatan selama 12 bulan	2.850.000.000	v		
			g		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>140.300.000</b>			<b>140.300.000</b>			
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	kab.tanjab timur	Terlaksananya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	90.300.000		Terlaksananya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	90.300.000	v		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	kab.tanjab timur	Terlaksananya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	50.000.000		Terlaksananya pendidikan untuk ASN sebanyak 10 orang	50.000.000	v		
			h		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										



					624.050.514						710.637.191				
				-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Penerangan kantor	kab.tanjab timur	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan	6.586.600		Tersedianya komponen instalasi listrik kantor selama 12 bulan	12.000.000	v		
				-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia Perlengkapan Kantor	kab.tanjab timur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	90.041.191		Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	90.041.191	v		
				-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya kegiatan kantor yang baik	kab.tanjab timur	Tercukupinya Pengadaan Barang cetakan & Photo Copy selama 12 Bulan	31.102.723		Tercukupinya Pengadaan Barang cetakan & Photo Copy selama 12 Bulan	35.500.000	v		



				-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan	kab.tanjab timur	Terpenuhiya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun	5.400.000		Terpenuhiya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun	5.400.000	v		
				-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhiya Makanan dan Minuman rapat, tamu dan petugas selama 1 Tahun	kab.tanjab timur	Terpenuhiya Makanan dan Minuman rapat, tamu dan petugas selama 1 Tahun	392.196.000		Terpenuhiya Makanan dan Minuman rapat, tamu dan petugas selama 1 Tahun	392.196.000	v		
				-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat, tamu dan petugas selama 1 Tahun	kab.tanjab timur	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	98.724.000		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	175.500.000	v		



				<b>i</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>37.782.265</b>			<b>55.000.000</b>			
				-	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor	kab.tanjab timur	Terlaksananya kebutuhan meubelair kantor	37.782.265		Terlaksananya kebutuhan meubelair kantor	55.000.000	v		
				<b>j</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>50.850.000</b>			<b>50.850.000</b>			
				-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertatanya administrasi surat menyurat kantor	kab.tanjab timur	Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan	2.850.000		Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan	2.850.000	v		



					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Air, Listrik, Telpn dan Internet kantor yang baik	kab.tanjab timur	Pembayaran Rekening listrik, air, telepon, dan internet selama 12 bulan	48.000.000		Pembayaran Rekening listrik, air, telepon, dan internet selama 12 bulan	48.000.000	v		
				<b>k</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.524.698.000</b>			<b>2.803.988.000</b>			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya service penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas	kab.tanjab timur	Terwujudnya operasional dinas menggunakan kendaraan dinas selama 1 tahun	815.740.000		Terwujudnya operasional dinas menggunakan kendaraan dinas selama 1 tahun	1.085.000.000	v		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kantor	kab.tanjab timur	Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala alat kantor selama 1 tahun	15.470.000		Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala alat kantor selama 1 tahun	25.500.000	v		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	kab.tanjab timur	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	1.693.488.000		Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	1.693.488.000	v		





		7	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>					5.246.620.845			5.246.620.845				
		m	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>					5.246.620.845			5.246.620.845				
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedinya sarana dan prasarana dan utilitas umum penunjang hunian		kab.tanjab timur	Meningkatnya sarana dan prasarana dan utilitas umum penunjang hunian	5.246.620.845		Meningkatnya sarana dan prasarana dan utilitas umum penunjang hunian	5.246.620.845	v		
				<b>JUMLAH</b>				<b>33.579.949.029</b>			<b>37.987.200.842</b>				



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Salah satu upaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada Masyarakat pada sektor perumahan rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa berusaha untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun kami menyadari bahwa program dan kegiatan yang sudah kami tuangkan dalam Rencana Kerja sebagai rujukan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum maksimal .

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Evaluasi yang di laksanakan ada beberapa kegiatan yang belum dapat di laksanakan , hal ini disebabkan karena masih terbatasnya Anggaran yang tersedia .
- Ada beberapa kegiatan yang progressnya belum maksimal, hal ini disebabkan karena sarana penunjang perlu ditingkatkan telah mencapai 100% atau telah maksimal.

Untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan sektor perumahan kepada masyarakat maka diharapkan ada peningkatan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , sehingga capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara maksimal dan komprehensif.



Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang transparan dan akuntabel serta komprehensif maka pembangunan perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas pendukung dapat berjalan secara baik dan optimal sehingga semua pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dapat mendukung visi, misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ada beberapa hal yang secara terus-menerus perlu mendapat perhatian sehingga kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara bertahap dapat dipenuhi. Sebagai upaya untuk melakukan percepatan pemenuhan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni harus dilaksanakan melalui berbagai sumber dana, diantaranya adalah dana APBD, APBN serta peran aktif seluruh masyarakat yang di usulkan secara hirarkhi melalui SIPKD milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini kami buat sesuai dengan ketentuan-ketentuan / aturan-aturan yang lebih berlaku dan kebijakan Kepala Daerah dan Dewan yang terhormat. Hal ini perlu dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan penyesuaian penyesuaian dengan kebutuhan yang diperlukan.

Demikian untuk di maklumi terima kasih.

Muara Sabak, Januari 2022

KEPALA DINAS



Drs. ADIL P. ARITONANG  
NIP. 196808311988101001